

FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal Penelitian Hukum De Jure memfokuskan pada bidang Hukum, menerima naskah karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang hukum, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

LEMBAGA PENERBIT

Jurnal Penelitian Hukum De Jure diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1410-5632

e-ISSN 2579-8561

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>

INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Indonesian Publication Index (IPI) Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); dan MORAREF

FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021- 2525015
Faksimili 021-2526438
Laman: www.balitbangham.go.id
Email: ejournaldejure@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by:



HALAMAN KOSONG

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum

Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi

Ahyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)

Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Nevey Varida Ariani, SH., M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai)

Muhaimin, S.H., (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H.,M.Si.

Jaya Laksana, S.E

Sekretariat

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P.

Asmadi, S.H

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si., (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Univ. Jenderal Soedirman
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
Hukum Administrasi Negara-Hukum Konstitusi-Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
3. Dhiana Puspitawati, S.H., L.LM., Ph.D.
Hukum Laut Internasional Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
4. Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM.
Hukum Perusahaan-Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
5. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
ADVERTORIAL	vii
KUMPULAN ABSTRAK	ix
Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah <i>(Legitimacy of Regional Head/Deputy Head Election in the Regional Autonomous Administration System)</i>	127 - 148
Marulak Pardede	
Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik <i>(The Application of Discretion In Granting The Status Of Indonesian Nationality to Archandra Thahar Viewed from the Principle of Good Governance)</i>	149 - 162
Muhamad Beni Kurniawan	
Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: <i>Community Based Development</i> <i>(Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model)</i>	163-182
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi	
Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia <i>(The Problems of Financing with Agreement of Fiduciary Transfer of Security)</i>	183-204
Henry Donald	
Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat <i>(The Implementation of Sundanese Local Wisdom in Spatial Layout According to The Law No. 26 of 2007 regarding Spatial Layout: A Case Studi in Bandung, West Java)</i>	205-218
Eko Noer Kristiyanto	
Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan <i>(Maritime Territorial Dispute in South China Sea)</i>	219-240
Muhar Junef	
Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia People's Efforts In Prevention And Eradication Of Illegal Logging In Indonesia <i>(Peoples's Efforts in Prevention and Eradication of Illegal Logging in Indonesia)</i>	241-256
Fuzi Narindrani	

Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
(*Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws*)..... 257-274

Nicken Sarwo Rini

Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengkete Berbasis
Adat di Kabupaten Manggarai

(*Initiatives Of The Regional Government In Alternative Settlement Of Traditional
Custom-Based Land Dispute in Manggarai District*)..... 275-288

Dian Agung Wicaksono dan Ananda Prima Yurista

BIODATA PENULIS xx - xxii

PEDOMAN PENULISAN..... xxiii - xxiv

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** bisa kembali menerbitkan Volume 18 Nomor 2 Juni 2018. Penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di edisi ini memuat 9 (delapan) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil-hasil penelitian/pemikiran ilmiah para peneliti dari berbagai lembaga dan instansi penelitian. Diharapkan dari hasil penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi yang berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.

Sebagaimana penerbitan-penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* sebelumnya, dalam Edisi Nonmor 2 Juni 2018 ini, redaksi masih juga menerbitkan beberapa topik yang aktual dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Khususnya isu yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah seputar korupsi E-KTP yang dilakukan oleh para anggota Legeslatif yang terhotmat.

Para pembaca setia *De Jure*, seiring perkembangan dalam masyarakat yang menjadi lebih maju dan lebih modern, terjadi pergeseran dari masyarakat yang tadinya sederhana dan homogen menjadi masyarakat yang modern dan heterogen. Hal ini berbanding lurus dengan permasalahan hukumnya yang semakin maju dan semakin modern, tindakan korupsi misalnya. Tindakan korupsi saat ini dilakukan pelakunya, dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan teknologi. Sehingga para penegak hukum harus mengimbangi kemampuannya dengan perkembangan teknologi pula agar tidak ketinggalan dengan para pelakunya

Apabila diperhatikan, tindakan korupsi bukanlah hal yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebab bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut beberapa pakar aspek-aspek penyebab seseorang melakukan korupsi karena dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan rangsangan dari luar (dorongan dari teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). Berdasarkan analisa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain: Aspek Individu Pelaku, yaitu Sifat Tamak Manusia, Moral yang Kurang Kuat, Tingkat upah dan gaji pekerja di sektor publik, Kebutuhan Hidup yang Mendesak, Gaya Hidup yang Konsumtif.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memberantas korupsi yang telah menggurita di Republik yang tercintai ini, maka Korupsi harus dianggap menghambat pewujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Karena telah menghinggapi diberbagai kalangan, baik pegawai pemerintah, swasta, anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah serta aparat penegak hukum, sehingga untuk penyelesaiannya dibutuhkan keadilan politik yaitu keadilan bagi seluruh warga negara

Di samping persoalan korupsi, dalam terbitan ini juga kami terbitkan berkaitan dengan persoalan Pilkada Serentak, Penataan Ruang Dalam Kaitannya dengan Kearifan Lokal, Problematik Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Mitra Bestari yakni Prof. Dr. Hibnu Nugroho, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Dhiana Puspitawati, S.H., L.L.M., Ph.D., Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M. dan Dr. Ridwan Nurdin, MCL, yang telah melakukan *review* atas semua tulisan yang diterbitkan pada edisi ini.

Jakarta, Juni 2018

Redaksi

HALAMAN KOSONG

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Marulak Pardede (Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Legitimacy Of Regional Head/Deputy Head Election In The Regional Autonomous Administration System

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 127 - 148

The regional head elections (“Pilkada”) have given raise to some legal issues in connection with the methods of election whether to elect only the head of the region or bundled with the election of the deputy head of the region. The currently applicable regulations provide for only the election of the head of the region, not including the deputy head. As a consequence, the deputy head of the region cannot automatically replace the head of the region when the later is permanently absent, but the substitute head of the regional must be elected by the regional legislative body or DPRD, from the candidates nominated by the parties supporting the replaced head of the region. Empirically, a bundled election of head/deputy head of a region will cause problems between the head and his/her deputy after being elected and when they start to administer the government affairs. The legitimacy of the head of the region and his/her deputy is of different level, as both are holding political offices, not career ones. The legal problems that may arise with regard to the legitimacy of the leadership of the head of the region and his/her deputy are, among others, as follows: How is the dynamics of the law development on Regional Head/Deputy Head Election in Indonesia?; and how is the legitimacy of the Regional Head/Deputy Head Election in regional autonomous administration in Indonesia? By using the legal comparison and juridical normative and sociologic method; as well as descriptive assessment type; Research tools: (Normative) Library Studies, and Documentary Studies from primary and secondary sources, and qualitative data analysis method, one can say that: By only electing the head of the region, what is mandated by the Article 18 clause 4 of the 1945’ Constitution has been fulfilled (electing only the heads of region such as Governor, Mayor, Regent). There is no provision in the constitution that regulates about the deputy head of a region, which is not the case in the Vice President. The deputy head of region should be appointed by the elected head of the region, which is also pursuant to the Law-substitute Government Regulation on Regional Head Election. Consequently it is necessary to review the regional head election system in the future.

Keywords: Election, Legal Standing and Regional Head / Deputy Head

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Muhamad Beni Kurniawan (Faculty of Law, University of Indonesia)

The Application of Discretion in Granting The Status Of Indonesian Nationality To Archandra Thahar Viewed from the Principle of Good Governance

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 149 - 162

In granting the Indonesian Nationality to a foreigner, the Government must observe the Law No. 12 of 2006 regarding Nationality. However the Ministry of Law and Human Rights has granted the RI nationality to Archandra, despite of the fact that Archandra had not met the requirements set out in Article 9 of the Law No. 12 of 2006 that an applicant for naturalization must have been residing in the territory of the Republic of Indonesia for at least 5 consecutive years or at least 10 non-consecutive years. The issue in this research is the regulation providing for the granting of the Indonesian Nationality viewed from the Law No. 12 of 2006 and how is the legal force of the Discretion of the Ministry of Laws and Human Rights in granting the status of RI Nationality to Archandra Thahar viewed from the Law No. 30 of 2014 regarding the Administration of Government Affairs and General Principles of Good Governance?. The research method employed is juridical normative method by using the primary, secondary and tertiary legal materials. From the result of the research it is concluded that the Discretion of the Ministry of Laws and Human Rights in granting the RI nationality to Archandra Thahar has been against the provisions of Article 32 of the Law No. 30 of 2014 regarding the Administration of Government Affairs as the Discretion is arbitrary, and not in accordance with the General Principles of Good Governance, such as the non-discriminatory principle and legal certainty. Consequently, in the future, the Ministry of Laws and Human Rights must only exercise its discretion in settling important and urgent issues not regulated, unobviously regulated or issues that provide no choice.

Keywords: Discretion, Nationality, The Principle of Good Governance

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi (Faculty of Law, University of Udayana)

Affairs Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 163 - 182

Indonesia is a country gifted with abundant marine resources. This potential should indeed be utilized for the improvement and acceleration of national economic development. Optimal and proportional utilization of marine resources will eventually help the communities living in the coastal areas to escape from the trap of poverty. Coastal area development has been regulated in the Law No. 1 of 2014 regarding Amendment to the Law 27 of 2007 regarding Coastal Area and Minute Islands Development, the Regulation of the Minister of Maritime and Fishery No. 40/PERMEN-KP/2014 regarding Roles and Empowerment of Communities in Coastal Area and Minute Islands Development. These regulations have provided directives to the coastal communities in developing and managing the coastal areas by observing the local traditions and wisdoms. According to this research, the appropriate community-based coastal area development in bringing prosperities to coastal communities has not been well formulated. This research is designed as an empirical legal research aimed to analyze the community-based coastal area development models. The result of the research concludes that the ideal model of the community-based coastal area development must be formulated from appropriate synergy and interaction among the government, the communities and values of local wisdoms. The empowerment of coastal communities in developing the coastal area management model is also an important issue aimed to encourage their independency. The employment of this model will bring benefits as the active participation of the coastal communities may increase incomes, preserve the coastal area, and provide more spaces to the coastal communities in developing and managing the marine resources by observing the potentials, characteristics and socio-culture of the people. Active roles of the coastal communities also bring hopes to the eradication of poverty issues that eventually will end up to the materialization of coastal communities justice and prosperity.

Keywords: Model, Management, Coastal Area, Communities, Laws

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Henry Donald (Law Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)

The Problems of Financing with Agreement of Fiduciary Transfer of Security

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 183-204

The issue of fiduciary transfer of security has never been regulated in the Indonesian Civil Code, it emerges from the public's needs for loans without necessarily delivering the collateral physically. The commonly applicable practices are the pledge of personal properties, not for use by the pawnshop (requiring physical delivery of personal properties) and hypothec (only for real properties). The circumstance gives raise to a fabricated method to satisfy the people's needs for financing by means of fiduciary transfer of security, which eventually acceptable to the practices and supported by some authorities. The research method employed in this paper is juridical normative and empirical method. To fill the vacuum of laws regulating the fiduciary transfer, the Government has issued the Law No. 42 of 1999 regarding Fiduciary Transfer of Security. The consideration has been to enable the financial institutions in helping the required finances for the businesses in order to improve the public economy. However, in the practice, the developed financial institutions have not been the financial institutions engaged in productive sectors that previously were expected to help the low-class entrepreneurs in improving the economy, but tend to provide multi-purpose financing to consumptive sectors. In the practice it is the multi-purpose financial institutions that create more legal problems in their relationship with the consumers. For example, the financial institutions that do not register the fiduciary transfer of security, when their consumers have failed to pay the installments, will attempt to seize the security by violent means. There have been also financial institutions that register the fiduciary transfer but their consumers fail to pay the installements and some even sold the securities.

Keywords: Problems, Financing; Fiduciary Transfer of Security

Eko Noer Kristiyanto (Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Implementation of Sundanese Local Wisdom In Spatial Layout According to the Law No. 26 of 2007 regarding Spatial Layout: A Case Study in Bandung, West Java

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 205-218

The state recognizes and respects the units of traditional communities including their traditional rights as long as they are still surviving and conforming to the communities development. The regional autonomy concept has provided the regions with more spaces to develop and utilize the potential resources that they have, in particular the land utilization in the areas. In the preparation of spatial layout plan, the public must be involved in the whole processes from the preliminary stages to the determination of the regional spatial layout plan. Traditional communities and their local wisdoms should have their existences recognized in the spatial layout plan, and their roles explicitly accommodated in the laws and regulations. The method employed in this paper is juridical normative method supported by empirical data in the field. This paper describes the implementation of Sundanese Local Wisdom in Spatial Layout Planning in Bandung City. Active participation is a key for the communities to pay the roles in the more actual way and not only in formal procedural activities

Keywords: Spatial Layout, Participation, Bandung, Sunda

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Muhar Junef (Law Research and Development Centre, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Maritime Territorial Dispute In South China Sea

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 219-240

South China Sea dispute has been regarded as the hottest dispute of 21st century, in which China, United States of America and some ASEAN members are indirectly involved. There are three (3) issues why the countries involved in the South China Sea conflict such as China, Taiwan, Vietnam, Philippines, Brunei Darussalam, and Malaysia are interested in fighting over the sea and lands areas of two islands, Paracel and Spratly in South China Sea. Firstly, the sea and lands on the lands in South China Sea contain highly rich natural resources, such as oil and natural gas and other marine resources. Secondly, the waters of South China Sea is the waters through which the international ships usually pass, in particular for the trading network connecting the Europe, America and Asia. Thirdly, rapid economic growth in Asia. This research emphasizes more on the first issue. What is the background of the dispute in the South China Sea? What are the roles ASEAN plays in the South China Sea dispute? This research is a normative legal research. According to the research it is concluded that the dipute at the South China Sea is an international dispute, as the actors are not only the claimant countries but also the other countries that are interested to the areas. Therefore, the South China Sea dispute cannot be settled by only observing the historical and legal aspects but also must involve peaceful negotiations. According to the research, it is recommended to the parties in South China Sea dispute to prepare a dispute settlement agenda by legal means and in the existing bilateral and multilateral fora.

Keywords: Maritime Territorial Dispute

Fuzi Narindrani (Law Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)

People's Efforts In Prevention And Eradication Of Illegal Logging In Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 241-256

All development brings impacts to the environmental changes in particular the exploitation of forestry natural resources within the scope of forestry products management and utilization will clearly demonstrate the effects of such changes. Forest destruction that brings negative impacts is a result of one of the crimes in forestry industry, the illegal logging, the effects of which are unpredictable to the forest conditions following the crime. In eradicating or mitigating the illegal logging the government has issued some policies including policies and laws and regulations related to the active roles of the communities. The flourishing practices of illegal logging by irresponsible persons have caused damages to the country and also to the people, therefore to what extent the country and the people can play their roles in mitigating or fighting the illegal logging will be important issues. Forest destruction that brings negative impact to the environment is an act of crime as defined in article 108 Chapter XV of the Law No. 32 of 2009 regarding Biological Environment Protection and Management. With regard to the management, the forest must be utilized, in the most possible manner, for the people's prosperity as mandated by article 33 clause (3) of 1945' Constitution, under which the State should control the natural resources including the forest and take advantages of the same for the people's well-being. While the active roles of the communities in eradicating the illegal logging are regulated in some laws and regulations. Legal awareness of the people should be put on top priority in order to support or induce the participation of the people in illegal logging eradication and the efforts to preserve the forests.

Keywords: People's efforts, Prevention, Illegal logging

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Nicken Sarwo Rini (Human Rights Research and Development Center, The Agency for Research and Development of Law and Human Rights)

Abuse Of Administrative Powers In Corruption Crime Laws

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 257-274

Only foreigners who bring benefits and not jeopardizing the security and public order who will be allowed to enter and reside in the territory of the Republic of Indonesia, by means of business expansion which in turn will bring positive impacts to the creation and expansion of job opportunities. The subject of this research is: The Law Enforcement against illegal foreign workers in Indonesia from the perspectives of Law and Policies implemented by the Government in enforcing the law against illegal foreign workers in Indonesia. This research uses judicial-empirical method with qualitative data analysis. Law enforcement against illegal foreign workers may take the forms of administrative actions by paying penalty/fine, deportation, revocation of Business License, if the requirements for employing foreign workers are not met the licensing institution may deport the foreign workers back to their countries of origin, as well as prevention and sanctions under criminal law with a threatened imprisonment. It is recommended to revise the regulation of Minister of Manpower and Transmigration on Procedures of Employing Foreign Workers and the issues related to foreign workers should be materials in the amendment to the Manpower Laws No. 13 of 2003 on immigration affairs, the visa-free policies, foreign workers and their families E-data exchanges. Focus should be given to the supervisory duties and function including the business process of TIMPORA to create effective law enforcement in view of diversified cultures of the communities that sometimes make it difficult to oversee the existence/whereabouts of illegal foreign workers.

Keywords: Law Enforcement, Foreign Workers, Illegal

Dian Agung Wicaksono, Ananda Prima Yurista (Faculty of Law, University of Gajah Mada)

Initiatives of the Regional Government in Alternative Settlement of Traditional Custom-Based Land Dispute in Manggarai District

Law Research Journal De Jure, 2018 March, Volume 18, Number 2, Page 275-288

Manggarai District has long experiences in dealing with land disputes, in particular those related to the existing traditional custom laws that live and grow in the communities of Manggarai people. Based on the experiences, initiatives of the regional government of Manggarai District are required for providing alternative settlement of traditional custom-based land disputes within the scope of achieving the development mission of Manggarai District as set out on the Bylaw of Manggarai District No. 7 of 2016 regarding Middle-Term Development Plan of Manggarai District of 2016-2021. In this case, it is necessary to further review the authorities of the regional government in the disputes settlement processes. What have been the initiatives of the Government Manggarai District in alternative settlement of traditional custom-based disputes? What are the chances of and challenges to the initiatives of the Government Manggarai District in such alternative settlement of traditional custom-based disputes? The questions are answered by this normative legal research combined with the empirical legal research by exploring the relevant primary and secondary data. The research demonstrates that there have been chances and challenges related to the settlement process of the traditional custom-based land disputes.

Keywords: Alternative Settlement of Land Disputes, Traditional Customs, Manggarai

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Marulak Pardede (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)****Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 127 - 148

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menimbulkan permasalahan hukum sehubungan dengan dilakukan dengan cara hanya memilih kepala daerah saja atau bersama sama satu paket dengan wakilnya. Aturan yang berlaku dewasa ini, pilkada hanya untuk memilih kepala daerah, tidak termasuk wakilnya. Sebagai konsekuensinya wakil kepala daerah tidak otomatis menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap, tetapi harus dilakukan pemilihan melalui DPRD, dengan calon yang diajukan oleh partai pengusung kepala daerah yang diganti. Berdasarkan fakta, pilkada satu paket menimbulkan persoalan setelah mereka terpilih dan memerintah diantara kepala dan wakilnya. Legitimasi kepala daerah dan wakilnya mempunyai derajat yang berbeda, dua-duanya jabatan politik, bukan jabatan karier. Permasalahan hukum tentang legitimasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil, dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu: Bagaimanakah dinamika perkembangan hukum tentang pemilihan kepala/wakil kepala daerah di Indonesia?; dan Bagaimanakah legitimasi pemilihan kepala/wakil kepala daerah dalam pemerintahan otonomi daerah di Indonesia? Dengan menggunakan metode perbandingan hukum dan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis; serta tipe penelitian deskriptif; Alat Penelitian studi kepustakaan/normatif (*library studies*), dan studi dokumen (*documentary studies*) dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Dengan hanya memilih kepala daerah, berarti telah sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, yaitu hanya memilih kepala daerah saja (gubernur, walikota, bupati). Tidak ada ketentuan di dalam konstitusi yang mengatur tentang wakil kepala daerah, sebagaimana diaturnya ketentuan tentang wakil presiden. Wakilnya dipilih sendiri oleh kepala daerah terpilih, sesuai juga dengan Perpu Pilkada. Oleh karenanya di masa mendatang sistem pemilihan kepala daerah perlu ditinjau ulang.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum dan Kepala/Wakil Kepala Daerah

Muhamad Beni Kurniawan (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)**Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 149 - 162

Dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing, Pemerintah harus tunduk pada UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Namun Kementrian Hukum dan HAM memberikan kewarganegaraan RI kepada Archandra, meskipun Archandra belum memenuhi syarat yang dimuat dalam Pasal 9 UU Nomor. 12 Tahun 2006 bahwa Permohonan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006?; dan Bagaimanakah Kekuatan Hukum Diskresi Kemenkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Diskresi Kemenkumham dalam pemberian kewarganegaraan RI kepada Archandra Tahar bertentangan dengan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Diskresi yang sewenang-wenang, serta tidak sesuai dengan AUPB yaitu asas non diskriminasi, asas kepastian hukum. Oleh karena itu kedepannya, Kemenkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harusnya hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang yang aturannya tidak ada, tidak jelas atau memberikan pilihan.

Kata Kunci: Diskresi, Kewarganegaraan, Asas Pemerintahan yang Baik**Kata kunci bersumber dari artikel****Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Anak Agung Istri Ari Atu Dewi (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)****Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development***

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 163 - 182

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf hidup kemiskinan. Pengelolaan pesisir telah diatur dalam UU 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan ini memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Sepanjang penelusuran peneliti, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir belum terformulasikan dengan baik. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa model yang ideal pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan nilai kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengelolaan wilayah pesisir juga sangat penting dilakukan dengan maksud untuk mendorong kemandirian mereka. Penggunaan model ini memiliki keunggulan karena peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan potensi, karakteristik dan sosial budaya masyarakatnya. Peran serta aktif masyarakat pesisir juga memberi harapan bagi pengentasan masalah kemiskinan yang berujung pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Model, Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Masyarakat, Hukum

Henry Donald (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 183-204

Pranata hukum jaminan fidusia tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dia muncul dari kebutuhan masyarakat akan kredit tanpa penyerahan barang secara fisik. Oleh karena ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dengan cara pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek diakui oleh yurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur fidusia, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertimbangannya, agar lembaga pembiayaan dapat membantu kebutuhan permodalan bagi dunia usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun dalam prakteknya lembaga pembiayaan yang berkembang bukan lembaga pembiayaan yang bergerak di sektor produktif yang diharapkan dapat membantu pengusaha ekonomi lemah dalam meningkatkan perekonomian, tapi lebih cenderung pada pembiayaan multiguna yang memberikan pembiayaan pada sektor konsumtif. Dalam prakteknya justru lembaga pembiayaan multiguna dalam hubungannya dengan konsumen ini yang banyak menimbulkan persoalan hukum. Misalnya, lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia ketika konsumen tidak membayar cicilan terjadi penarikan barang yang berakhir dengan kekerasan. Ada juga lembaga pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia tetapi konsumen tidak membayar cicilan bahkan mengalihkan barang jaminan.

Kata Kunci: Problematika, Pembiayaan, Jaminan Fidusia

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Eko Noer Kristiyanto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 205-218

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konsep otonomi daerah membuat daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Masyarakat adat beserta kearifan lokalnya diakui eksistensinya dalam penataan ruang, bahkan peranannya diakomodir secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang dilakukan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yang didukung oleh data-data empirik di lapangan. Tulisan ini menjelaskan implementasi kearifan lokal sunda dalam penataan ruang di kota Bandung. Partisipasi aktif menjadi kunci agar masyarakat dapat berperan secara nyata dan bukan hanya sekedar aktivisme prosedural formil

Kata Kunci: Penataan Ruang, Partisipasi, Bandung, Sunda

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Muhar Junef (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 219-240

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Adapun 3 (tiga) hal mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia. Permasalahan dalam penelitian ini lebih menekankan pada: 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya Sengketa di Wilayah Maritim di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan?; 2. Peran ASEAN dalam Sengketa di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa antarnegara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim namun juga negara-negara lainnya yang berkepentingan di wilayah tersebut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan tidak saja pada aspek historis (sejarah) dan hukum tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada para pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan untuk menyiapkan agenda penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum maupun membicarakannya melalui forum-forum bilateral dan multilateral yang telah ada.

Kata Kunci: Sengketa Wilayah Maritim

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Fuzi Narindrani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 241-256

Setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan. Dalam melakukan pemberantasan atau menangani pembalakan liar ini pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan termasuk beberapa kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat. Dengan semakin meraknya pembalakan liar atau *illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat maka sejauh mana pemerintah terutama masyarakat dapat berperan serta dalam menanggulangi atau memberantas pembalakan liar atau *illegal logging*. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 108 BAB XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dimana Negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum masyarakat sangat diutamakan guna menunjang atau ikut berpartisipasi dalam pemberantasan pembalakan liar dan upaya mendorong tercapainya hutan lestari

Kata Kunci: Upaya Masyarakat, Pencegahan, Pembalakan Liar**Nicken Sarwo Rini (Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)****Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 257-274

Penegakan hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan hukum. Selain itu juga harus dapat membuktikan dakwaannya secara lebih mudah dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tulisan ini hendak menguraikan permasalahan mengenai penyalahgunaan wewenang administrasi oleh aparat pemerintah yang dikualifikasikan melawan hukum. Dalam tataran teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan dan pembaruan hukum di bidang Administrasi Pemerintahan dan tindak pidana korupsi yang selama ini diterapkan terhadap apatur pemerintahan yang menjalankan aktivitas pemerintahan dengan menggunakan diskresi dimana penggunaan kewenangan tersebut berakibat pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang Undang Administrasi Pemerintahan telah merumuskan dan mengkategorisasikan 3 (tiga) bentuk tindakan larangan penyalahgunaan wewenang yaitu: larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-sewenang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah seharusnya dapat menjadi rujukan bagi penyidik KPK untuk tidak melakukan penangkapan penyidikan terhadap terdakwa sebelum adanya putusan dari peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Administrasi, Korupsi

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Dian Agung Wicaksono, Ananda Prima Yurista (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)

Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 275-288

Kabupaten Manggarai memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan sengketa tanah, khususnya bila dikaitkan dengan eksistensi hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Manggarai. Bertolak dari pengalaman tersebut, perlu adanya inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk mewujudkan alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat dalam rangka menegawantahkan misi pembangunan Kabupaten Manggarai yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa? Bagaimana inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? Bagaimana peluang dan tantangan terhadap inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? Pertanyaan tersebut dijawab melalui penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris untuk menggali data primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan terkait pengaturan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah, Adat, Manggarai